

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdullah, Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, cetakan ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Agustin Narang, Teras, Reformasi Hukum Pertanggungjawaban Seorang Wakil Rakyat, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.
-, Reformasi Hukum, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Andreae, Fockema, Kamus Istilah Hukum : Belanda – Indonesia, Binacipta, Bandung, 1983
- Attamimi, A. Hamid S. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi, UI-Jakarta, 1990
- Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Busroh, Abu Daud, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2001. Darnadi, Dandung, 2001, www.ireyogya.org.
- Deddy Supriady Bratakusumah, dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Dennis A. Rondinelli dalam Ismail Husen, Yayasan Karya Dharma, IIP, Jakarta, 1998.
- Djokosutono, Hukum Tata Negara, (dihimpun oleh Harun al Rasid), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Faisal, Sanafiah, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999.
-, Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Apilkasi, Y.A.3, Malang, 1990.
- Hadjon, Philipus M, Sistem Pembagian Kekuasaan Negara (Analisis Hukum Tata Negara), Yudika Desember 1999, FH. UNAIR Surabaya.
-, Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila, Makalah disampaikan pada simposium tentang Politik, Hak Asasi dan Pembangunan Hukum dalam rangka Dies Natalis XL dan lustrum VIII Universitas Airlangga, Surabaya, 3 November 1994

-, Keterbukaan Pemerintah dan Tanggung Gugat Pemerintah, Makalah disampaikan pada seminar Hukum Nasional ke-VI dengan tema Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 12-15 Oktober 1999.
- Hossen, Bhenyamin, Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II, Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dari Segi Ilmu Administrasi Negara. Desertasi untuk Gelar Doktor pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1993 dan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, UI, Jakarta, 1995.
- Kaho, Josef Rihu, Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia, Bhineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Kaloh, J., Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, Bhineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Kansil, C.S.T., Sistem Pemerintahan Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
-, Hukum Antar Tata Pemerintahan, Airlangga, Jakarta.
- Kartohadikoesoema, Sutardjo, 1964, Desa, Sumur, Bandung.
-, 1984, Desa, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Kusnardi, Muhammad, dan Ibrahim Harmaily, Hukum Tata Negara, Pusat Studi Hukum Tata Negara, F.H. UI dan CV. Sinar Bhakti, Jakarta, 1981.
-, dan Saragih R Bintan, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1983.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung, 1976
- Mahfud MD, Mohammad, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Bhineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Manan, Bagir, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945, UNISKA, Karawang, 1993
- Mangunsong, Parlin M., Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sarana Perubahan UUD, Alumni, Bandung, 1992

- Marbun, B.N., Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Miles, B, Matthew & Michael A. Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta.
- Misdianti dan Kartasapoetra, 1993, Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moeloeng, Lexi, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, 2000.
- Muslimin, Amrah, Ikhtisar Perkembangan Otonomi Daerah 1903-1958, Jambatan, Jakarta, 1960.
- Nur Achmad Affandi, dalam Boedi Dewantoro, Strategi Pembangunan Daerah Konteks Ekonomi, Philosophy Press, 2001.
- Osborne, David, 1996, Banishing Bureaucracy : The Five Strategies For Reinventing Government, East Lansing, Michigan.
- Pide, Andi Mustain, Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1998.
- Pringgodigdo, Kedudukan Presiden Menurut Tiga Undang Undang Dalam Teori dan Praktek, Pembangunan, Jakarta
- Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1966.
-, Prinsip Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
-, Reformasi Hukum Pertanggungjawaban Seorang Wakil Rakyat, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.
- Ryaas Rasyid, Muhammad, Kajian Awal Birokrasi Pemerintah dan Orde Baru, Yarsip Watampone, Jakarta, 1998.
- Roll, Werner, 1983, Struktur Pemilikan Tanah di Indonesia : Studi Kasus Daerah Surakarta Jateng, Rajawali, Jakarta.
- Safrudin, Ateng, 1985, Pasang Surut Otonomi Daerah, Bina Cipta, Bandung.
-, 1998, Otonomi dan Antisipasi Perkembangan, Suatu Bahan Penyebaran Pemahaman Otonomi Daerah, Bandung.

- Salam, Dharma Setyawan, Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya, Jambatan, Jakarta, 2002.
- Saleh, Ismail, Demokrasi, Konstitusi, dan Hukum, Depkeh RI, Jakarta, 1988
- Santoso, Sudir, SH, 2005, SK Perpanjangan Kades Tak Salahi Aturan, Kolom Kedungsapur pada Harian Suara Merdeka, Edisi 26 Juli 2005.
- Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999
- Selicman dalam Ermaya Suradinata, Kebijakan Pembangunan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Perkembangan Teori dan Penerapan, Ramadan, Bandung, 1993.
- Sitorus, Edward Berlin Drs, MSi, 2004, Pemahaman Singkat Tentang Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Pengaturan Mengenai Kecamatan-Desa-Kelurahan Serta Pokok-Pokok Pikiran Tentang RPP Mengenai Desa Sebagai Perubahan Atas PP Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, makalah yang disajikan didalam Forum Sosialisasi Undang-Undang Pemerintahan daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal PMD Departemen Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 2004, Direktorat Jenderal PMD, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Soemitro, Ronny Hanintijo, Peran Metodologi dalam Pengembangan Ilmu Hukum, Masalahmasalah Hukum, Majalah.
- Soemantri, Sri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992.
-, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1984,
- Stewart, Aileen Mitcheel, 1994, Empowering People, Pittman Publishing, London.
- Sudardi, SH, 2004, Kajian Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5

Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang diajukan Komisi A DPRD bersama Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 2004, Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Sudijat, Iman, 1981, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta

Sumardjono, Maria SW, 1989, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Tidak dipublikasikan, Yogyakarta.

Suny, Ismail, Pembagian Kekuasaan Negara, Aksara Baru, Jakarta, 1985.

....., Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Aksara Baru, Jakarta, 1983,

Suryaningrat, Bayu, 1997, Pemerintahan dan Administrasi Desa, Ghalia Yayasan Beringin KORPRI Unit Depdagri, Bandung

....., Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan Indonesia Suatu Analisa, (Jilid 1), Dewa Ruci Press, Jakarta, 1981.

Syaukani, dkk, 2002, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, cetakan kesatu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Syaukani, HR, 2001, Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah, Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Kabupaten Kutai Kalimantan Timur.

Taher Azhary, Muhammad, Negara Hukum, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1992.

Teguh Yuwono (ed), Manajemen Otonomi Daerah, Clogapps, Diponegoro University, 2001

Thaib, Dahlan, DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2000.

....., Pancasila Yuridis Ketatanegaraan, Yogyakarta, UPP-AMPYKPN, 1994.

The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, (Jilid 1), Liberty, Yogyakarta, 1993

Tim Lapera, Otonomi Pemberian Negara, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Tumpal P. Saragih, 2001, Kajian Normatif Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Turunannya disajikan pada pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) tanggal 3-5 Mei 2000 di Yogyakarta, Tumpal P. Saragih. Wasistiono, Saddu, Prof. DR, 2000, Pengembangan Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, makalah untuk Rapat Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Desa di Hotel Indonesia, Jakarta.

Yudoyono, Bambang, Otonomi Daerah, Pustaka Harapan, Jakarta, 2002.

Yunus, Didi Nazmi, Konsepsi Negara Hukum, Angkasa Raya, Padang, 1992.

Zakaria, R. Yando, 2002, Pemulihan Kehidupan Desa dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dalam UNISIA No.46/XXV/III/200

HAW Widjaya ,2004,otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli, bulat dan utuh,PT Radja Grafindo Persada,Jakarta,Hlm 4-5

Y Zakaria ,2005,Pemulihan Kehidupan Desa dan UU Tahun1999,Dalam Desentralisasi,globalisasi,dan Desentralisasi lokal,LP3S,Jakarta,Hlm,332

HAW Wijaya,2004,Otonomi desa merupakan otonomi yang asliOp.cit,hlm 4

HAW Widjaya ,2004,Otonomi desa merupakan Otonomi yang asliIbid,

David Osborne, Hasil terjemahan dalam bukunya “Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government”, East Lansing, Michigan, 1996, hlm : 56.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen

Undang-Undang Otonomi Daerah 1999, CV. Tamita Utama, Jakarta, 2000

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa ,

Himpunan Perundang-undangan RI Tentang Otonomi Daerah, Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah; Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004, Nuansa Aulia, Bandung, 2005

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah, 2004, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Semarang.

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, 1999, Pengaturan Desa dan Kelurahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, 1999, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan desa , Bag Pemdes Brebes 2015.

Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan desa ,Bag Pemdes Brebes 2015.

Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ,Bag Pemdes brebes 2015.

C. Makalah

Arah Politik Pemerintahan UU NO 23/2014 Oleh: Ari Darmastuti1

Review UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Oleh :Harry Kusuma, S.IP